



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat selesai sesuai waktu. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan evaluasi Renja terdahulu untuk penyelarasan program dan kegiatan dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2023. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan. Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

Kuala Tungkal, 13 September 2023

H Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. YANERY, S.Pt, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700930 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat	44
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	78
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	80
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	81
3.3 Program dan Kegiatan.....	85

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.....	89
BAB V PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan.

Program dan Kegiatan OPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021-2024, yang berfungsi dengan sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah baru dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Renja). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus segera menyusun dan menetapkan Renja 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DPMPTSP Tahun 2024;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN. TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3.3 Program dan Kegaitan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program

Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran 1 ditunjang dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, didukung dengan 6 (Enam) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel :

Sasaran	Program	Target	Realiasasi	Capaian Kinerja
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	94%	94%

Pencapaian indikator program pada sasaran 1 bisa dikategorikan “sangat baik”.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Sasaran 2 ditunjang dengan 1 (Satu) Program Pelayanan Penanaman Modal, didukung dengan 1 (Satu) kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel:

Sasaran	Program	Target	Realiasasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas	Program Pelayanan			

Pelayanan Perizinan	Penanaman Modal	2000 Izin	2769 Izin dan Non Perizinan	138,54%
---------------------	-----------------	-----------	-----------------------------	---------

Pencapaian indikator program pada sasaran 2 bisa dikategorikan “sangat baik”.

Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah

Sasaran 3 ditunjang dengan 4 (Empat) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, didukung dengan (Empat) kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 3 tersaji dalam tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
	Program Promosi	2 Calon Investor	3 Calon Investor	150%

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Penanaman Modal			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	232 M	1.002 T	432,0%
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%

Pencapaian indikator program pada sasaran 3 bisa dikategorikan “sangat baik”.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu dan capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL : T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPM PTSP DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPM PTSP S.D 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	35 Buku	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Pengaangara n, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	74 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	35 Buku	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuantgan Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/ Bulan	24 Dokumen	24 Orang/ Bulan	23 Orang/ Bulan	100%	12 Bulan	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Bulan	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.0 5	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggara nya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60 Paket	150 Paket	82 Stell	100%	82 Stell	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	85 Paket	10 Jenus	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	260 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	100%	45 Paket	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	800 Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	100%	1000 Paket	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	120 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5000 Laporan	12 Bulan	1000 Laporan	1000 Laporan	100%	1000 Laporan	DPM PTSP	100	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	100%	90 Unit	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah										
2.17.01.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	100%	90 Unit	DPM PTSP	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	100%	54 Unit	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang disediakan									
	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mabel yang disediakan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	DPM PTSP	100	
2.18.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpelihannya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPM PTSP	100	
2.18.02.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit Kendaraan Jabatan Roda 4, 13 Unit Kendaraan Roda 2	2 Unit Kendaraan Jabatan Roda 4, 13 Unit Kendaraan Roda 2	2 Unit Kendaraan Jabatan Roda 4, 13 Unit Kendaraan Roda 2	2 Unit Kendaraan Jabatan Roda 4, 13 Unit Kendaraan Roda 2	100%	2 Unit Kendaraan Jabatan Roda 4, 13 Unit Kendaraan Roda 2	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	1 Unit Kendaraan Operasion al	1 Unit Kendaraan Operasion al	1 Unit Kendaraan Operasiona l	1 Unit Kendaraan Operasiona l	100%	1 Unit Kendaraan Operasiona l	DPM PTSP	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	DPM PTSP	100	
2.18.02.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	5 Unit	1 Kali	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02	Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	6 Dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	0	0	
2.18.02.1.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/ Kota										
2.18.02.1.01. 02	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provin si dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	0	0	0	-	5 Dokumen	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	11	1	2	0	-	2	0	0	
2.18.03.1.0 1	Penyelenggar aan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah sesuai Stategis yang di rencanakan	11	1	2	0	-	2	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	1 Pameran Investasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Total Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	596 Izin	596 Izin	2000 Izin	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.04.1.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	596 Izin	596 Izin	2000 Izin	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	2 Laporan	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.2.01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitemen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1600 Kegiatan Usaha	2500 Izin	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	100	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.2.01. 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Palayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	24 Orang	4 Laporan	6 Orang	6 Orang	100	6 Orang	6 Orang	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.2.01. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	3 Produk Hukum	3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	100	3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	100	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Rencana Investasi	509 M	162 M	232 M			370 M			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.1.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	509 M	162 M	232 M			370 M			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.1.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24 Kegiatan Usaha	1 Laporan	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	100	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.1.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	320 Pelaku Usaha	2 Kali	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	100	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.1.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	48 Kegiatan Usaha	12 BAP	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterapkan	6 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	
2.18.06.1.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6 Laporan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/ Kota										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2016- 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Keterang an
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.06.1.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya realisasi investasi
3. Meningkatnya nilai investasi

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel T-C.30 sebagai berikut :

**TABEL : T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		A	A	A	A (Nilai 90,65)	A (Nilai 94)	A	A	
		Rata-rata waktu Layanan Izin		7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	
		Jumlah Pengaduan Masyarakat		5 Pengaduan	4 Pengaduan	3 Pengaduan	-	-	4 Pengaduan	3 Pengaduan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	1406 Izin	596 Izin	2000 Izin	2000 Izin	
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Rencana Investasi		162 M	232 M	301 M	1,1 Trilyun	Rp. 485.747.763.646,00	232 M	301 M	
		Jumlah Pengawasan Perusahaan yang diawasi dan kendalikan		16 Perusahaan	18 Perusahaan	18 Perusahaan	15 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	18 Perusahaan	18 Perusahaan	
		Jumlah kajian potensi dan peluang usaha kabupaten		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah calon investor		1	2	2	-	-	2	2	
		Jumlah sistem informasi pelayanan Perizinan dan non perizinan yang diterapkan		1 Sistem Informasi							

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya terbatas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi - fungsi penegakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.

Dengan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dapat menjadi ikon Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penegakan Reformasi Birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjadi Kantor Percontohan Zona Integritas dari KPK Republik Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya-upaya agar Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola antara lain :

1. Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan dan non perijinan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan juga pengembangan inovasi - inovasi baru dalam penyampaian informasi dengan menggunakan Jaringan Internet, Website, Email dan berbagai peralatan yang terkomputerisasi sehingga akurasi dan tranparansi dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi. Setiap Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menandatangani Pakta Integritas setiap tahunnya di hadapan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memahami Kode Etik yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pegawai) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu antara lain:
 - Belum optimalnya penerapan dan standar oprasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan
 - Adanya keterbatasan Sumber Daya Mansuia baik kualitas maupun dalam mendukung pelaksanaan program

- Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki belum menandai dalam memperlancar pelayanan publik
- Pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan di DPMPTSP belum Optimal
- Implementasi waktu penyelesaian proses perizinan dan sesuai SOP belum Optimal
- Masih ada peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis
 1. Pemahaman masyarakat tentang layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah
 2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif
 3. Penerapan informasi teknologi yang belum optimal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja BPPPT dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

TABEL : T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	4.760.853.039	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	14.060.000.00 0	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Perencanaan, Penguasaan, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	27.084.000	Perencanaan, Penguasaan, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	165.000.000	APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Laporan	27.084.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Laporan	165.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.365.992.689	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.200.000.000	APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.214.672.689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	4.900.000.000	APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	151.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	300.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	12 Bulan	35.750.000	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	12 Bulan	200.000.000	APBD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	DPM PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150 Paket	35.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	DPM PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150 Paket	100.000.000	APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM PTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM PTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	100.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100%	450.309.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100%	4.550.000.000	APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Paket	7.399.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Paket	240.000.000	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	65.748.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	2.000.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	100 Paket	33.900.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	100 Paket	65.000.000	APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 Paket	19.182.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 Paket	125.000.000	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DPM PTSP	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	24 Dokumen	13.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DPM PTSP	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	24 Dokumen	120.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1000 Laporan	310.278.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1000 Laporan	2.000.000.000	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	90 Unit	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	90 Unit	2.000.000.000	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25 Unit	500.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	21 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	21 Unit	1.000.000.000	APBD
Pengadaan Mabel	DPM PTSP	Jumlah Paket Mabel yang disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Mabel	DPM PTSP	Jumlah Paket Mabel yang disediakan	5 Unit	500.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	627.560.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	1.135.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	160.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	325.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	625.560.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	650.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpelihanny a Barang Milik Daerah	100%	204.157.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpelihanny a Barang Milik Daerah	100%	810.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit	76.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit	200.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	14 Unit	47.112.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	14 Unit	200.000.000	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	30.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	210.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	1 Unit	50.025.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	1 Unit	200.000.000	APBD
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	10.100.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	90.000.000	APBD
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi	DPM PTSP	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	10.100.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi	DPM PTSP	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	90.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dokumen	10.100.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dokumen	90.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Program Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Calon Investor	2	130.100.000	Program Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Calon Investor	2	265.000.000	APBD
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Jumlah Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah sesuai Stategis yang di rencanakan	2	130.100.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Jumlah Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah sesuai Stategis yang di rencanakan	2	265.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	75.000.000	APBD
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	80.100.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	190.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Total Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2000 Izin	109.399.800	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Total Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2000 Izin	470.000.000	APBD
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2000 Izin	109.399.800	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2000 Izin	470.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	35.673.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	100.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	400 Kegiatan Usaha	19.026.800	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	400 Kegiatan Usaha	200.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPM PTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	6 Orang	27.350.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Palayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM PTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	6 Orang	100.000.000	APBN

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	3 Kegiatan Usaha	27.350.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	3 Kegiatan Usaha	70.000.000	APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Nilai Realisasi Rencana Investasi	370 M	41.132.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Nilai Realisasi Rencana Investasi	370 M	58.500.000	APBN

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	370 M	41.132.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	370 M	58.500.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kegiatan Usaha	9.632.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kegiatan Usaha	21.000.000	APBN

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPM PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Pelaku Usaha	24.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Pelaku Usaha	29.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pengawasan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha	7.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha	8.500.000	APBD
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterapkan	1 Sistem Informasi	13.568.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterapkan	1 Sistem Informasi	52.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Sistem Informasi	13.568.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Sistem Informasi	52.000.000	APBD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	13.568.000	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	52.000.000	APBD
				5.065.152.839	JUMLAH				14.995.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam menyusun Rancangan Renja salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2022, Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Berdasarkan hal diatas, usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada

tingkat kecamatan, Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana pada tabel T-C.32 Sebagai Berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintahan, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat Sebagai salah satu instansi di lingkungan pemerintah daerah perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan perencanaan strategis yang tepat. Perencanaan strategis yang disusun digunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu sebagai model dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan biaya yang transparan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mengurangi jumlah “Perantara” dalam pengurusan perijinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.

3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan dengan mengembangkan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi serta mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah, mudah cepat dan transparan serta tanggap dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjng Jabung Barat. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan serta peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari

masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah seperti diuraikan di bawah ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pembangunan di bidang Perijinan menetapkan **VISI “MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN BERINVESTASI YANG MUDAH, TRANSPARAN DAN PASTI”** Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang mudah bermakna bahwa proses pelayanan perijinan dan berinvestasi tidak berbelit-belit, mudah di mengerti dan tidak melibatkan personil yang melebihi beban volume kerja yang berdampak pada biaya.
2. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang murah bermakna bahwa meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan bila memungkinkan bebas biaya.

3. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang pasti bermakna bahwa ijin yang telah diperoleh dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan dan setiap tujuan memiliki sasaran tertentu maka ditetapkanlah Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi efektifitas dan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan promosi peluang investasi serta produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan pelayanan Perizinan penanaman modal dan Investasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Perizinan penanaman modal dan Investasi pada perusahaan fasilitas dan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Dari Penjabaran di atas, maka didapat tujuan dan sasaran dari Misi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Berikut :

1. Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang komprehensif dan kontinyu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan serta perizinan penanaman modal dan investasi;
2. Melakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung proses perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan investasi yang berbasis IT;
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam transparansi biaya perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi dengan teknologi yang terintegrasi;
4. Melakukan pelayanan yang terbuka dan mudah dengan berbasis teknologi informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
5. Melakukan system pengelolaan perijinan yang handal dengan mengembangkan pola pelayanan perijinan yang efektif dan efisiensi yaitu tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran sehingga tercipta system pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan pasti.
6. Menciptakan suasana perkantoran yang tenang, aman dan nyaman khususnya bagi pemohon/publik;
7. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
8. Perekrutan pegawai dengan profesional dan terbuka untuk umum melalui metode uji kepatutan dan uji kelayakan (Fit and Proper Test);
9. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan Sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal dan informal;
10. Melakukan sinergitas pengelolaan pelayanan perijinan yang tangguh dengan stakeholders sesuai prinsip koordinasi, instegrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

11. Melakukan menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh Sumber Daya Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi peningkatan perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mabel

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengeni Pemberian Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal**Kegiatan : Penyelenggaraab Promosi Penanaman Modal**

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal**Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan secara lengkap dapat dibaca pada Tabel T.C-33 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Renja disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditrasformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembanguanna daerah. Dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, baik program utama yang

merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Renja di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Tahun 2021-2024.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyusun dan menetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rancangan tahun lalu, permasalahan dan rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran beserta jajarannya pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui pemberian dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPM & PTSP juga tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan/ Sub Kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.